

Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau

Vinny Alvionita Riva

Hainim Kadir

Deny Setiawan

Email: vinny.alviva@gmail.com

ABSTRACT

Poverty is a complex and complicated issues that require analysis in order to obtain a solution to overcome poverty or at least reduce poverty. This study aimed to examine the effect of the unemployment rate and the level of the minimum wage on poverty levels in Riau province.

This research uses secondary data. Analysis of the data in this study using a multiple linear regression method. Hypothesis testing using partial test (t test), simultaneous (F test), Test Correlation Coefficient (R) and test the coefficient of determination (R²). The data used in this study are data on the number of poor people, the number of unemployed and the level of the minimum wage in the province of Riau Province in 2002-2011.

The results of the testing that has been done, the entire regression test showed that all independent variables have a significant effect on the dependent variable. Individual regression test showed that the number of open unemployment has no significant effect on the number of poor people in Riau province, but the provincial minimum wage have a significant effect on the number of poor people of Riau Province. The magnitude of the effect caused by the two independent variables together on the dependent variable of 92.1%, while the remaining 8.8% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: Poverty, Unemployment, Province Minimum Wage.

Pendahuluan

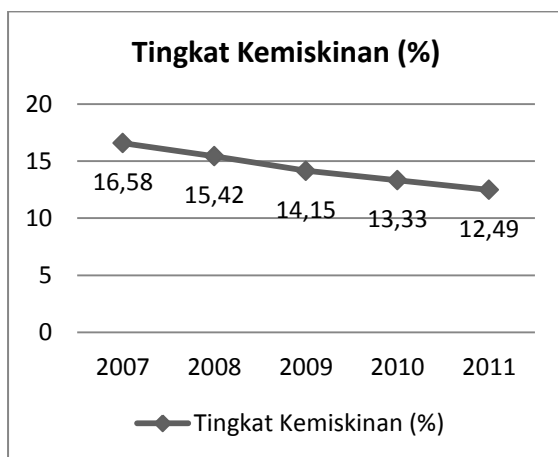
Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia sehingga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan disuatu wilayah.

Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menciptakan pembangunan yang berkesinambungan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah Negara dengan tujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tulus T.H. Tambunan, 2009).

Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan negara berkembang, salah satunya Indonesia. Seperti yang telah banyak diketahui, telah banyak kebijakan dan program-program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan namun tetap saja penanggulangan kemiskinan tidak sesuai harapan karena terkendala dengan kondisi masyarakat yang ada.

Gambar 1. Grafik Tingkat Kemiskinan Indonesia tahun 2007-2011



Sumber: BPS, diolah

Tingkat kemiskinan Indonesia 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, terlihat pada tahun 2007 tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 16,58%, dan

semakin menurun hingga tahun 2011 sebesar 12,49% (BPS, 2011). Kemiskinan Indonesia memang menunjukkan suatu penurunan namun Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara berkembang karena kemiskinan yang turun tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Dari sekian banyak penduduk miskin, masyarakat yang berprofesi sebagai petani merupakan jumlah terbanyak dari kelompok masyarakat miskin. Data statistik Indonesia tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk miskin berjumlah 31 juta jiwa dengan jumlah perkotaan 11 juta jiwa dan pedesaan yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani sebanyak 19 juta jiwa. Kondisi ini disebabkan oleh faktor penduduk desanya yang mengalami ketidakmerataan pendistribusian hasil-hasil pembangunan, selain itu kemiskinan di pedesaan juga merupakan sikap mental penduduknya yang mengalami kemiskinan alamiah dan kultural, keadaan ini dapat dilihat dari ketidakberdayaan mereka dalam penguasaan modal, keterampilan, teknologi serta hambatan struktur yang membuat mereka berada dalam lingkaran kemiskinan yang tidak ada ujungnya selama turun-temurun.

Kemiskinan berpengaruh besar terhadap angka pengangguran. Salah satu cara untuk keluar dari lingkaran kemiskinan adalah dengan menawarkan diri

untuk masuk kedalam pasar kerja, dengan bergabungnya seseorang dalam pasar kerja tentu saja kesejahteraan seseorang tersebut meningkat, sehingga seseorang tersebut bebas dari kemiskinan.

Secara umum pengertian pengangguran adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja dan belum memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan salah satu masalah pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara berkembang karena seperti yang kita tahu negara berkembang mempunyai masalah dengan jumlah penduduk sehingga sering kali negara berkembang mengalami ledakan penduduk. Kebijakan-kebijakan untuk mengatasi ledakan penduduk sudah dilaksanakan namun tetap saja penduduk setiap tahunnya selalu bertambah.

Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurut indikator kemiskinan BPS, terlihat pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin 722.410 jiwa menjadi 482.050 jiwa pada tahun 2011, ini berarti kebijakan-kebijakan dilaksanakan dengan baik meskipun tetap saja angka kemiskinan Provinsi Riau masih tergolong tinggi dan tidak mendorong pembangunan lebih baik sama sekali. Sementara pada jumlah pengangguran terbuka mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Ini dapat dilihat pada tahun 2002 angka

pengangguran sebesar 215.157 jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yaitu 250.286 jiwa. Angka ini terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2006 mengalami penurunan sebanyak 202.387 jiwa hingga tahun 2010 kembali angka pengangguran kembali naik sebanyak 207.247 jiwa. Namun dari sekian tahun, angka pengangguran yang paling besar terdapat pada tahun 2004 dimana pada tahun tersebut tercatat sebesar 364.594 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau relatif besar yang tersebar pada daerah pesisir, aliran sungai, kepulauan dan daerah pedalaman yang terisolir.

Tabel 1: Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, dan Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau Tahun 2002-2011

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)
2002	4.125.295	722.410	215.157
2003	4.413.432	751.300	250.286
2004	4.491.393	744.400	364.594
2005	4.614.930	600.400	307.862
2006	4.764.205	564.900	202.387
2007	4.984.304	574.500	207.138
2008	5.189.154	566.700	183.522
2009	5.306.533	527.500	193.505
2010	5.538.367	500.300	207.247
2011	5.738.543	482.050	136.222

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota, BPS 2002-2011.

Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit

dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh (Sonny Sumarsono, 2003).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Menurut UU No. 13/2003, upah minimum diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu kebijakan upah minimum adalah salah satu strategi pemerintah menanggulangi kemiskinan, dengan menghitung kebutuhan dasar, seperti: pangan, sandang, dan perumahan, sekaligus sebagai jaring pengaman sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa transportasi.

Riau merupakan salah satu provinsi dengan upah minimum yang tinggi. Ini menjadi salah satu daya tarik para pencari kerja dari luar provinsi masuk dan bergabung dalam pasar tenaga kerja di Provinsi Riau. kebijakan pemerintah untuk meningkatkan upah minimum di suatu daerah akan berdampak terhadap peningkatan upah rata-rata buruh Provinsi

Riau. Semakin tinggi peningkatan upah minimum, semakin rendah peningkatan tingkat kemiskinan di Riau.

Tabel 2. Jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2002-2011

Tahun	Upah Minimum Provinsi (Rp)
2002	394.000
2003	437.500
2004	476.900
2005	551.500
2006	637.000
2007	710.000
2008	800.000
2009	901.600
2010	1.016.000
2011	1.120.000

Sumber: Keadaan Angkatan Tenaga Kerja, BPS 2002-2011

Tingkat upah minimum meningkat dari tahun ke tahun, terlihat pada tahun 2002 sebesar Rp. 394.000,- dan menjadi Rp. 1.120.000,- pada tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah kebijakan yang tepat untuk mengurangi pengangguran yang memicu pada menurunnya angka kemiskinan Provinsi Riau.

Dengan tingkat upah minimum yang meningkat setiap tahunnya, hanya sebagian saja yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Terbukti dari masih meningkatnya angka kemiskinan dan angka pengangguran yang masih tinggi.

Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang melekat dan sulit untuk ditanggulangi. untuk menanggulangi masalah kemiskinan tentu harus

ditanggulangi dari dasar. Seperti menaikkan upah minimum dan perluasan kesempatan kerja sehingga masyarakat mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.

Dari latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengangguran dan tingkat upah minimum provinsi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau?

Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud sehingga lebih mudah memahami penelitian ini, penulis perlu membatasi masalah yang diteliti ke dalam ruang lingkup yang jelas. Adapun pada variabel tingkat pengangguran yang dimaksud adalah jumlah pengangguran terbuka, karena pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah, dapat disimpulkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah pengangguran terbuka dan upah terhadap tingkat kemiskinan di

Provinsi Riau. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam berfikir terutama menyangkut masalah yang sedang diteliti, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah, dan sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan pendapatan tapi juga dari aspek sosial, lingkungan dan tingkat partisipasi. Sen (1995) menyatakan bahwa kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah (*low income*), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas (*capability handicap*). kemiskinan dapat menjadi penentu dan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kriminalitas, kekerasan, perdagangan manusia, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak. Dengan demikian kemiskinan tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi rendahnya pendapatan tetapi harus dari banyak aspek yang saling terkait sehingga bersifat multidimensi.

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari kekuatan yang ada pada-Nya. (Bellinger, 2007) mengatakan

konsep kemiskinan melibatkan multidimensi, multidefinisi dan alternatif pengukuran. Kemiskinan merupakan satu dari masalah yang sulit untuk didefinisikan dan dijelaskan. Secara umum, kemiskinan dapat diukur dalam dua dimensi yaitu dimensi *income* atau kekayaan dan dimensi non-faktor keuangan. Kemiskinan dalam dimensi *income* atau kekayaan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima karena pendapatan rendah biasanya bersifat sementara, tetapi juga diukur melalui kepemilikan harta kekayaan seperti lahan bagi petani kecil dan melalui akses jasa pelayanan publik. Sedangkan dari dimensi non-faktor keuangan ditandai dengan adanya keputusan atau ketidakberdayaan yang juga dapat menimpa berbagai rumah tangga berpenghasilan rendah.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu: (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata, (2) lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Jelas, bahwa setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai oleh suatu negara tersebut pasti akan tetap parah, demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan disuatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemelaratan juga akan semakin meluas (Todaro,2000).

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning (2001, dikutip Ravi Dwi Wijayanto, 2010) seseorang dikatakan miskin bila mengalami “*capability deprivation*” dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bappenas mempunyai makna yang relatif luas, yaitu dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan, antara lain adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban

kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

Indikator kemiskinan yang umum digunakan di Indonesia adalah garis kemiskinan (*poverty line*). BPS (Badan Pusat Statistik) menentukan batas garis kemiskinan di Indonesia berdasarkan besaran rupiah yang digunakan untuk dibelanjakan per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Indikator menurut BPS adalah:

1. Tidak miskin, adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610,-
2. Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488,- sampai Rp 350.610,- atau sekitar antara Rp 9.350,- sampai Rp11.687,- per orang per hari.
3. Hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740,- sampai Rp 280.488,- atau sekitar antara Rp 7.780,- sampai Rp 9.350,- per orang per hari.
4. Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala Rp 233.740,- kebawah atau sekitar Rp 7.780,- kebawah per orang per hari.

5. Sangat miskin (kronis) tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya.

Dalam upaya pengidentifikasian penduduk miskin, indikator kemiskinan yang digunakan BKKBN Provinsi Riau yang dikombinasikan dengan indikator yang digunakan Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau yaitu:

1. Frekuensi makanan minimal 2 kali sehari.
2. Konsumsi lauk paku berprotein tinggi.
3. Memiliki pakaian yang berbeda untuk kegiatan yang berbeda.
4. Kepemilikan aset.
5. Luas lantai perkapita.
6. Jenis lantai
7. Ketersediaan air bersih
8. Kepemilikan jamban

Teori Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara tidak langsung dan paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti menurunnya standar kehidupan dan tekanan psikologis (Mankiw, 2000)

Menurut Kuncoro (2000) dengan menggunakan pendekatan angkatan kerja, pengangguran terbagi menjadi tiga jenis yaitu pertama, pengangguran friksional. Pengangguran jenis ini adalah

pengangguran yang muncul karena pekerja masih mencari pekerjaan yang sesuai jadi ia menganggur bukan karena tidak ada pekerjaan. Pengangguran ini tidak menimbulkan masalah dan bisa diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang muncul karena perubahan struktur dan kondisi perekonomian. Pengangguran ini sulit diatasi karena terkait dengan strategi pembangunan sebuah negara. Meskipun demikian pengangguran ini dapat diatasi dengan melakukan pelatihan agar tercipta tenaga kerja terampil. Ketiga, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena faktor musim. Misalnya para pekerja industri yang mengandalkan hidupnya dari pesanan. Pengangguran ini juga tidak menimbulkan masalah, meskipun belum ada bukti empirik yang mendukung.

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan (Sadono Sukirno, 2004)

Adapun secara dasar penyebab terjadinya pengangguran adalah karena terjadinya ketidak seimbangan antara faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran sebagaimana diketahui secara umum (Sugiyanto,2006), antara lain:

1. Rendahnya tingkat pendidikan
2. Rendahnya keterampilan dan pengalaman yang dimiliki
3. Tidak sebandingnya antara kerja dan lahan pekerjaan
4. Faktor-faktor lain (misalnya pilih-pilih pekerjaan)

Teori Upah

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah telah terlibat dalam menangani masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1, disebutkan bahwa setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar

nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 1992).

Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat. Tingkat upah alami naik proporsional dengan standar hidup masyarakat. Sama halnya dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa (Mankiw, 2003).

Kebijakan upah minimum harus diintegrasikan dengan kebijakan lain agar upaya peningkatan kesejahteraan buruh dapat lebih efektif. Kewajiban negara ini dapat dilakukan diantaranya melalui penyediaan akses terhadap pelayanan publik (seperti perumahan, pelayanan kesehatan, transportasi, pendidikan untuk anak), subsidi dan pengelolaan jaminan sosial bagi buruh, penegakan hukum dalam masalah jaminan sosial, insentif pajak bagi perusahaan yang memberikan opsi kepemilikan saham, serta upaya peningkatan kesejahteraan buruh secara lokal dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah (M. Adriani Kappatari, 2002).

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kehidupan yang layak. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari pada minimum. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lulu Husni, dalam Agustine dan Ariawan, 2012).

Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja (No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30): "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di provinsi Riau, karena penulis melihat sebagai provinsi yang tergolong pesat kemajuannya serta perkembangannya. Selain itu memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dan memiliki letak yang strategis untuk jalur perdagangan. Akan tetapi

jumlah penduduk miskin masih relatif besar.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah disusun secara teratur dan berupa laporan-laporan yang telah diterbitkan oleh instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik maupun publikasi, jurnal-jurnal maupun brosur-brosur serta buku referensi dan kepustakaan yang dianggap relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini mengambil data tahunan yang meliputi jumlah penduduk miskin yaitu penduduk dalam kondisi ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pada penelitian ini menggunakan jumlah penduduk miskin dalam satuan jiwa pada tahun 2002-2011 di Provinsi Riau. Jumlah pengangguran terbuka yaitu jumlah penduduk yang sudah masuk sebagai angkatan kerja tetapi belum mendapat pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jumlah pengangguran terbuka tahun 2002-2011. Upah minimum provinsi (UMP), upah adalah suatu balas jasa yang diterima oleh para pekerja sebagai imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh para pemberi kerja. Didalam penelitian ini upah yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2002-2011 dalam satuan rupiah.

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode yang bersifat

kuantitatif yaitu untuk melihat seberapa besar dan bagaimana hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat upah terhadap tingkat kemiskinan di Riau. Dalam penelitian ini menggunakan metode linear regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independent yaitu jumlah pengangguran dan tingkat upah terhadap variabel dependent yaitu tingkat kemiskinan di Riau. Hubungan antara variabel tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Dengan menggunakan persamaan regresi liner berganda persamaan diatas dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

Dimana :

- Y = Jumlah penduduk miskin (orang)
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- X_1 = Jumlah pengangguran terbuka (orang)
- X_2 = Tingkat Upah Minimum Provinsi (Rp)
- μ = *Disturbance Error* atau kesalahan pengganggu pada persamaan linier

Pengujian Hipotesis dilakukan beberapa uji koefisien regresi secara simultan (uji F) parsial atau individual (uji

T), uji koefisien korelasi (r), dan uji koefisien determinasi (R^2).

a. Uji Simultan (Uji F), Uji simultan menunjukkan bahwa apakah terdapat pengaruh dari variabel bebas/prediktor terhadap variabel terikat/respon secara simultan. Hipotesis pada uji F yaitu :

- H_0 : Seluruh variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara simultan
- H_1 : Seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan.

Pada regresi linier berganda, kondisi yang diharapkan adalah menerima hipotesis H_1 . Hipotesis H_1 diterima apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($F_{df_1, df_2 (\alpha)}$) atau nilai signifikansi lebih kecil dari α 5% (0.050).

b. Uji Parsial (Uji T), Uji parsial menunjukkan bahwa apakah setiap variabel bebas dapat memberikan pengaruh pada variabel terikat.

c. Koefisien Korelasi (r), digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. semakin besar nilai koefisien korelasi maka semakin erat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen atau sebaliknya.

d. Determinasi Berganda (R^2) dari suatu perhitungan berkisar antara +1

dan -1, koefisien korelasi yang bertanda (+) menunjukkan arah korelasi yang positif, sedangkan yang bertanda (-) menunjukkan arah yang negatif. Sementara itu bila koefisien korelasi bernilai 0, berarti tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Koefisien korelasi bernilai 1, berarti hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya kuat.

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian secara empiris mengenai pengaruh jumlah pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi terhadap tingkat kemiskinan. Alat analisis yang digunakan meliputi regresi linier berganda, uji hipotesis secara keseluruhan (uji-F) dan individual (uji-t), uji koefisien korelasi (r), serta uji koefisien determinasi berganda (R^2).

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen selama periode 2002-2011. Dalam penelitian ini perhitungan dilakukan dengan menggunakan program *SPSS for Windows* versi 17.0, maka setelah data-data diinput diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3: Hasil Penelitian Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2002-2011.

Variabel	Koefisien	Std. Error	Thitung	Sig.	Fhitung	Sig.
X1	0,168	3,12	0,540	0,606	18,322	0,002
X2	-0,336	0,82	-4,110	0,005		
C	801961,452	-	-	-	-	-
R = 0.916 R ² = 0,840 Nilai t _{tabel} (α = 5%) = 2,364 Nilai F _{tabel} = 4,74						

Berdasarkan hasil regresi tabel 3, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 801961,452 + 0,168 X_1 - 0,336 X_2$$

Persamaan tersebut merupakan hasil penghitungan melalui uji t, uji F, koefisien korelasi dan koefisien determinasi berganda. Maka hasil koefisien regresinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (β_0) = 801961,452, nilai ini berarti jika semua variabel independen (jumlah pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi) sama dengan nol atau dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*) maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 801.961 jiwa.
- Nilai koefisien (β_1) = 0,168. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat responsif (sensitifitas) dari variabel dependen (jumlah penduduk miskin) terhadap variabel independen (jumlah pengangguran terbuka), maka dapat

dihitung elastisitas rata-rata dari variabel Y terhadap variabel X₁ dengan menggunakan rumus:

$$E_1 = b_1 \cdot \frac{\bar{X}_1}{\bar{Y}}$$

Dimana:

E_1 = elastisitas rata-rata dugaan

b_1 = koefisien regresi dari variabel X₁

\bar{X}_1 = nilai rata-rata dari variabel dependen X₁

\bar{Y} = nilai rata-rata dari variabel independen

Maka nilai elastisitas rata-rata dugaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E_1 &= b_1 \cdot \frac{\bar{X}_1}{\bar{Y}} \\ &= 0,168 \cdot \frac{226.792}{603.446} \\ &= 0,063 \end{aligned}$$

Nilai $E_1 = 0,063$ dapat diinterpretasikan jumlah pengangguran terbuka meningkat sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin di

Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 0,063 persen. Dengan asumsi variabel lain (upah minimum provinsi) tetap, maka jumlah pengangguran terbuka berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau.

- c. Nilai koefisien (β_2) = -0,336. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat responsif (sensitifitas) dari variabel dependen (jumlah penduduk miskin) terhadap variabel independen (jumlah pengangguran terbuka), maka dapat dihitung elastisitas rata-rata dari variabel Y terhadap variabel X_1 dengan menggunakan rumus:

$$E_2 = b_2 \cdot \frac{\bar{X}_2}{\bar{Y}}$$

Dimana:

E_2 = elastisitas rata-rata dugaan

b_2 = koefisien regresi dari variabel X_2

\bar{X}_2 = nilai rata-rata dari variabel dependen X_2

\bar{Y} = nilai rata-rata dari variabel independen

Maka nilai elastisitas rata-rata dugaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E_2 &= b_2 \cdot \frac{\bar{X}_2}{\bar{Y}} \\ &= -0,336 \cdot \frac{704.450}{603.446} \\ &= -0,392 \end{aligned}$$

Besaran $E_2 = -0,392$ dapat diinterpretasikan jika upah minimum provinsi meningkat sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 0,392 persen. Dengan asumsi variabel lain (jumlah pengangguran terbuka) tetap, maka upah minimum provinsi berhubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Implikasi yang dapat ditarik adalah kenaikan upah minimum provinsi dapat memperkecil angka kemiskinan. Dalam penentuan jumlah upah minimum provinsi pemerintah harus mempertimbangan keinginan buruh dan keinginan perusahaan. Sehingga dalam menetapkan kebijakan, pemerintah dapat menguntungkan perusahaan namun secara tidak langsung berdampak positif terhadap buruh. Hal ini sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan.

Kesimpulan

1. Variabel tingkat pengangguran terbuka (X_1) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Elastisitas dari pengangguran sebesar 0,063 dapat

diinterpretasikan jumlah pengangguran terbuka meningkat sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 0,063 persen. Dengan asumsi variabel lain (upah minimum provinsi) tetap. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diharapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh dan berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

2. Variabel upah minimum provinsi (X_2) berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Elastisitas dari upah minimum provinsi sebesar $-0,392$ dapat diinterpretasikan jika upah minimum provinsi meningkat sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 0,392 persen. Dengan asumsi variabel lain (jumlah pengangguran terbuka) tetap. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diharapkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh dan berhubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.
3. Adanya hubungan yang positif antara jumlah pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau yang didasarkan pada koefisien

determinasi berganda (R^2) sebesar 0,840. Hal ini berarti 84% jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh jumlah pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi, sedangkan 16% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Saran

1. Pemerintah Provinsi Riau hendaknya memperluas kesempatan kerja dengan mempermudah untuk membuka izin usaha agar kesempatan kerja semakin besar sehingga banyak tenaga kerja terserap yang akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan.
2. Pemerintah bersama pihak-pihak terkait lainnya agar dapat menciptakan program latihan kerja agar tenaga kerja di Provinsi Riau memiliki keahlian sehingga memperkecil angka pengangguran karena tenaga kerja yang memiliki keahlian dapat diterima bekerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.
3. Diharapkan pemerintah untuk dapat menetapkan kebijakan upah agar menaikkan upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk melindungi pekerja dari kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Omas Bulan Samosir. 2010. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. 2002-2011. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2002-2011. *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Pendataan Penduduk/ Keluarga Miskin Provinsi Riau 2004*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Provinsi Riau*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik.
- Gaspersz, Vincent. 1991. *Ekonometrika Terapan*. Bandung: Tarsito.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi: edisi keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia. 1999. *Peraturan Menteri tentang Upah Minimum*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Upah Minimum*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sulistiawati, Rini. 2012. "Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia". *Jurnal EKSOS Vol. 8 No. 3, 2012*. Pontianak.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Demografi FE UI.